PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Selasa Tanggal: 23 September 2008 Halaman: 15

Pakansi

Kepatihan, kantor 'Perdana Menteri' kasultanan

Dalem Kepatihan terletak di ruas Jl Malioboro Jogja dulunya merupakan tempat kediaman resmi Pepatih Dalem. Di tempat inilah pada zamannya diselenggarakan kegiatan pemerintahan sehari-hari kerajaan. Sejak tahun 1945 kantor Patih Kesultanan ini menjadi kompleks kantor pemerintahan provinsi DIY.

Selain Pendopo Kepatihan, sisa bangunan lama tempat ini juga dapat dilihat pada Gedhong Wilis (kantor gubernur), Gedhong Bale Mangu (dulu digunakan sebagai gedung pengadilan Bale Mangu, sebuah badan peradilan Kesultanan Yogyakarta dalam lingkungan peradilan umum), dan Masjid Kepatihan.

Kepatihan mempunyai sejarah panjang dalam sistem pemerintahan Kasultanan. Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mulanya diselenggarakan dengan sistem warisan Mataram. Sultan memegang seluruh kekuasaan pemerintahan negara dan dalam tugas kesehariannya dibantu Pepatih Dalem. Awalnya terdapat dua pepatih yaitu Pepatih Lebet dan Pepatih Jawi. Dalam perkembangannya Pepatih lebet dihapuskan dan Pepatih jawi disebut sebagai Pepatih Dalem.

Setidaknya sampai 1792 posisi Keraton dan VOC merupakan mitra sejajar. Untuk menjamin posisinya maka VOC menempatkan seorang residen di Jogja untuk mengawasi Kasultanan. Kedudukan Residen ini mulanya berada di bawah Sultan dan sejajar dengan Pepatih. Namun kemudian Daendeles menaikkan kedudukan Residen menjadi minister, yang merupakan menteri Raja/Ratu Belansa dan mewakili kehadiran Gubernur Jenderal.

Sejak kedatangan Rafles, Sultan tidak diperbolehkan mengadakan hubungan dengan negara lain sebab kedaulatan berada di tangan pemerintah Inggris. Begitu pula dengan Pepatih Dalem, Pengurus Kerajaan diangkat dan diberhentikan berdasar kebutuhan pemerintah Inggris.

HARIAN JOGJA/TALCHAH HAMID

Pada 1915, Belanda menyusun APBN Kasultanan yang dibagi menjadi dua yaitu APBN untuk Parentah Ageng Keraton dan APBN untuk Parentah Nagari yang berada dalam kontrol Hindia Belanda. Setiap tahun Sultan mendapat uang yang ditentukan dalam kontrak politik sebelum Sultan ditahtakan. Sultan benar benar tersingkir dari pemerintahan Nagari dan hanya berperan di istana saja.

Sultan Hamengku Buwono IX setelah naik tahta pada 1940 melakukan perombakan dengan membentuk badan-badan pemerintahan baru yakni Paniradya yang masing-masing dikepalai oleh Paniradyapati. Lembaga ini tidak di bawah Pepatih Dalem melainkan langsung di bawah Sultan. Dengan perlahan namun pasti Sultan memulihkan kembali kekuasaannya selaku kepala pemerintahan.

Pada pertengahan 15 Juli 1945 Pepatih Dalem KPHH Danurejo VIII, mengundurkan diri karena memasuki usia pensiun. Sejak saat itu Sultan tidak menunjuk Pepatih Dalem. Sebagai kelanjutannya birokrasi kasultanan dibedakan jadi dua yaitu urusan dalam istana dan urusan luar istana. Urusan dalam istana ditangani oleh Parentah Ageng Karaton yang dipimpin saudara atau putera Sultan. Sedangkan Sultan memimpin lembaga luar istana, yang terdiri dari beberapa Paniradya yang dipimpin bupati.

Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per 2. Kantor Kesatuan Bangsa	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005